

LAPORAN PENGADUAN
IUIPHHK PT KHARISMA CHANDRA KENCANA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
2021

oleh :
Perkumpulan Panah Papua

Ditujukan kepada
Balai Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah
Maluku Papua

Profil Perusahaan

PT. Kharisma Candra Kencana (PT KCK) adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Izin Nomor 183 Tahun 2008. Perusahaan ini melakukan kegiatan industrinya di Km 09 Kampung Wesiri Ditrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. PT Kharisma Candra Kencana memulai usahanya sejak Tahun 2017.

PT KCK hanya mengolah bahan baku jenis kayu merbau, bahan bakunya berasal dari beberapa daerah di Tanah Papua yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana & Kabupaten Nabire Provinsi Papua¹. Berdasarkan Laporan Hasil Penilikan Ketiga PT KCK yang dilakukan oleh PT Mutu Certification pada Bulan Maret (2020) menyatakan bahwa pada satu tahun terakhir PT KCK hanya menyuplai bahan baku kayu bulat dari hutan negara, tidak ada penerimaan kayu bulat hutan hak maupun kayu olahan.

Sertifikat Legalitas Kayu dari PT KCK pernah dibekukan oleh PT Mutuagung Lestari pada Bulan Mei 2018. Pembekuan tersebut dilakukan karena PT KCK tidak menanggapi rencana penilikan yang akan dilakukan oleh PT Mutuagung Lestari terhadap PT KCK. Pada saat yang sama juga terdapat pemberitaan bahwa PT KCK menerima kayu ilegal dari PT Nurkhasanah Karunia Abad (PT NKA), perusahaan kontraktor yang menangani pekerjaan jalan di Kabupaten Teluk Bintuni. Penegak hukum memasang garis polisi di areal industri PT KCK. Namun kasus ini baru selesai pada Tahun 2019 setelah Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat menyerahkan kasus ini kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dinas Kehutanan menjatuhkan sanksi pelanggaran administrasi terhadap PT KCK atas perbuatan yang telah dilakukan.

¹ Hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT KCK

Temuan

1. PT KCK Diduga Menyuplai Kayu Olahan

PT KCK telah mengakui bahwa sejak Bulan Juni 2018 sampai Januari 2020 tidak menyuplai kayu olahan ke industri mereka. Pengakuan tersebut tercatat di dalam laporan hasil penilikan kedua dan ketiga PT KCK yang dilakukan oleh PT Mutu Certification pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di Industri milik PT KCK pada Tanggal 30 November 2020, pemantau menemukan adanya kayu olahan jenis merbau yang diduga berasal dari luar industri PT KCK. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT KCK mengakui bahwa kayu olahan jenis merbau tersebut disuplai dari luar dan dititipkan di industri PT KCK. Karyawan tersebut menambahkan bahwa kayu disuplai di wilayah satuan pengembangan (SP) di Bintuni (Lihat dokumen I, rekaman wawancara dengan Karyawan PT KCK).



Gambar 1. Kayu Olahan Yang Diduga Disuplai dari Luar Industri PT KCK

Tambahan informasi dari karyawan PT KCK yang diwawancara bahwa kayu olahan tersebut diakui milik seorang mantan panglima Kodam Kasuari, Joppy Onesimus Wayangkau yang diperoleh dari masyarakat adat di Bintuni dan dititipkan di PT KCK yang kemudian akan dikirim di Yogyakarta melalui Surabaya untuk pembangunan hotel milik Joppy.

2. Asal Usul Kayu Olahan PT KCK Diduga dari Kayu Masyarakat

Berdasarkan laporan investigasi dan pemantauan sebelumnya di PT KCK, ditemukan adanya gayu gergajian yang disuplai dari luar industri PT KCK. Berdasarkan wawancara salah satu karyawan PT KCK yang bernama Hendro, diperoleh informasi bahwa kayu tersebut dititipkan oleh pemilik kayu yang diduga adalah mantan pejabat tinggi di Kodam Kasuari Papua Barat (Lihat rekaman wawancara 1 PT KCK). Karyawan tersebut menambahkan bahwa kayu gergaji tersebut diangkut menggunakan perahu kecil oleh prajurit TNI dari wilayah atas (wilayah atas yang dimaksud adalah wilayah Satua Pengembangan atau SP 4 di Distrik Bintuni).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di wilayah sekitar SP4 yang bernama Marten membenarkan bahwa PT KCK diduga menyuplai kayu gergaji masyarakat yang berasal dari Kampung Awaba SP4 (Lihat rekaman wawancara 2 PT KCK). Kayu gergaji tersebut akan dikirimkan ke gresik dan rencananya diteruskan ke Yogyakarta untuk pembangunan hotel milik pejabat TNI.

Pemantau berencana melaporkan adanya kayu olahan ini kepada Balai Penegak Hukum LHK Maluku Papua pada Bulan Januari.

3. PT KCK diduga Menyuplai Kayu NPL dari PT RKA

Sejak Tahun 2016 hingga saat ini, ditemukan dugaan bahwa PT KCK menerima kayu dari PT RKA melalui PT KPM. Kayu tersebut berstatus sebagai kayu NPL. Dugaan ini diakui oleh karyawan PT KCK bahwa perusahaan tempat dia bekerja pernah menyuplai kayu dari Meyado/Stenkool yang merupakan wilayah kerja dari PT RKA. Kayu dari PT RKA diduga diterima sekiat Tahun 2018 sampai Tahun 2019.

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Kesimpulan

1. Ditemukan kayu olahan yang diduga disuplai dari luar industri. Padahal PT KCK tidak menyuplai kayu olahan. Kayu olahan tersebut diperkirakan akan dikirim ke Yogyakarta melalui Surabaya. Hingga saat ini kayu olahan masih berada di Industri milik PT KCK
2. Terdapat dugaaan kuat PT KCK menyuplai kayu olahan dari masyarakat yang berasal dari kampung Awaba SP4.
3. PT KCK diduga kuat pernah menyuplai kayu NPL dari PT RKA sekitar tahun 2018 sampai 2019